Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Andi Muhammad Refil^{1,2}, Ma'ruf Hafidz¹ & Muhammad Rustam¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: andiri.140169@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui pelaksanaan kontrak pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Kabupaten Soppeng dan upaya yang dilakukan oleh pihak pengguna barang dan jasa bilamana terjadi keterlambatan di dalam penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Kabupaten Soppeng. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk menentukan penyedia barang dan jasa dilakukan dengan metode seleksi atau pelelangan. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa adalah perjanjian dimana suatu pihak yaitu penyedia barang dan jasa sepakat menyerahkan barang atau melaksanakan jasa tertentu dan pihak pengguna barang dan jasa sepakat membayar atas barang yang telah diserahkan atau jasa yang dilaksanakan, Kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng dibuat dengan akta dibawah tangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pengguna barang dan jasa bilamana terjadi keterlambatan di dalam penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Kabupaten Soppeng dengan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan dengan amandemen Kontrak, sanksi denda, dan pemberhentian kontrak.

Kata Kunci: Pelaksanaan; Pengadaan, Barang; Jasa; Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of government procurement contracts for goods and services in Soppeng Regency and the efforts made by the users of goods and services if there is a delay in completing the work of the procurement of government goods and services in Soppeng Regency. This type of research is empirical research. The results of research on the implementation of government procurement of goods and services to determine the providers of goods and services are carried out by the selection or auction method. The Goods and Services Procurement Contract is an agreement in which a party, namely a provider of goods and services, agrees to deliver goods or carry out certain services and the goods and services user agree to pay for the goods that have been delivered or services performed, a contract for the procurement of government goods and services at the District Education Office Soppeng made by deed under the hand. Efforts made by the users of goods and services when there is a delay in the completion of the work of the procurement of government goods and services in Soppeng Regency by increasing the time for carrying out the work by amending Contracts, sanctions fines, and terminating contracts.

Keywords: Implementation; Procurement of goods; Services; Government

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting (Listiyanto, 2012). Namun tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dan penggunaan anggaran (Badjuri & Trihapsari, 2004).

Lahirnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 secara khusus ditujukan untuk mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, baik yang bersumber pada anggaran negara (APBN/APBD) maupun non anggaran (bantuan/sumbangan dana dan luar negen). Keputusan Presiden ini sekaligus mendorong terjadinya globalisasi dan liberalisasi sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Selain membenahi kelemahan-kelemahan dalam aturan sebelumnya, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 juga menambahkan beberapa hal yang prinsipil dan strategis agar upaya pencegahan korupsi. Berikut aspek penting dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 :

1. Adanya kejelasan bahwa pengguna anggaran daerah adalah pengguna barang dan jasa. (Pasal 1)
2. Adanya kewajiban untuk mengumumkan rencana pengadaan barang dan jasa setiap awal tahun dan sanksi kepada panitia dan penyedia barang dan jasa bila terbukti curang dalam pengumuman lelang.
3. Adanya ketentuan untuk mengangkat pejabat pengadaan dalam pengadaan barang/jasa Rp. 50 juta. (Pasal 1)
4. Adanya kewajiban bagi pengguna barang dan jasa serta panitia PBJ untuk memiliki sertifikat keahlian.
5. Adanya perubahan segmen pasar, hanya ada usaha kecil dan non usaha kecil, tidak ada segmen pasar untuk jasa konsultansi.
6. Masa transisi bagi jasa pelaksanaan konstruksi golongan menengah Rp. 1-3 milyar dan UK jasa konsultansi konstruksi s.d. Rp 200 juta.
7. Sertifikat Badan Usaha-PBJ Non Konstruksi bukan syarat mutlak PBJ (sukarela).
8. Biaya penggandaan dokumen lelang diperkenankan
9. Dibukanya akses masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tender.
10. Menghilangkan *Conflict of Interest* (Larangan pengawas, pimpinan proyek menjadi anggota panitia; larangan PNS menjadi penyedia).
11. Mendorong diutamakannya penggunaan pascakualifikasi dibanding prakualifikasi.
12. Larangan menambah persyaratan kualifikasi di luar yang sudah ditentukan dalam Keppres (Ex : pembatasan wilayah, persyaratan dan mempunyai KTA KADIN, dll.)
13. Panitia pengadaan diperlukan untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp 50 juta, dan jumlah anggota panitia pengadaan minimal 3 orang atau berjumlah ganjil.
14. Memudahkan proses pra/pasca kualifikasi dengan membudayakan kualifikasi dengan tidak menyerahkan secara langsung dokumen yang banyak tetapi hanya dengan surat pernyataan.
15. Dimasukkannya pasal mengenai penerapan Fakta Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Namun dalam Keppres ini penjelasan

mengenai mekanisme penerapan Fakta Integritas belum dijelaskan secara detail.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Bunga, *et.al.* 2019), terutama adendum keenam menyebutkan untuk melaksanakan penerapan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Pemerintah juga secara aktif melakukan perbaikan atau pembaruan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Sedikitnya, Keputusan Presiden ini sudah mengalami 7 kali penibahan yang cukup signifikan. Yang terakhir adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya (Pane, 2018). Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, makakedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku (Hidayat, 2020). Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut, biasanya pemerintah melakukan perjanjian pemborongan seperti yang terdapat dalam Pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan manapihak yang satu (si pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang ditentukan (Laya, 2009).

Dalam suatu perjanjian pemborongan itu harus ada pihak yang saling mengikatkan diri yaitu antara si pemborong dengan pihak yang memborongkan dan dalam perjanjian pemborongan itu ditentukan hak si pemborong serta kewajibannya, adanya suatu pembayaran, adanya resiko dan lain-lain (Kunanti, 2009). Pihak yang memborongkan atau pengembang dapat berupa badan hukum baik pemerintah maupun swasta. Si pengembang mempunyai rencana memborongkan proyek sesuai dengan Surat perjanjian pemborongan/kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek. Kontrak inilah yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pihak pemborong.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tidak ditemukan pengertian kontrak pengadaan barang, yang ada hanya pengertian kontrak. Kontrak adalah perikatan antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007).

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan "siapa" perjanjian itu diadakan.

Penyedia barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang. Kemudian kontrak pengadaan barang merupakan kontrak yang dikenal dalam kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah, dimana sumber pembiayaannya berasal dari APBN/APBD ataupun yang berasal dari bantuan/sumbangan dari negara lain (Arsana, 2016). Pengertian pengadaan barang dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal (penelitian sosio-yuridis) yang biasa disebut penelitian empiris. Dalam penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengkajian terhadap pelaksanaan barang dan jasa pemerintah yang menjadi objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja (Satker) di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menurut **Drs. Umar, M.Si** sebagai Kabid Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng bahwa penggunaan anggaran dalam melakukan kontrak untuk pengadaan barang dan jasa adalah mengacu pada Pasal 6 Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003. Penggunaan anggaran untuk jasa dan barang atau swakelola telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng (Wawancara hari, Selasa, tanggal 8 Maret 2011).

Dengan acuan aturan tersebut maka penggunaan anggaran swakelola dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng tahun 2011 dapat dilihat ada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Penggunaan Anggaran Swakelola Dari APBD Untuk Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Tahun 2011

No	Paket	Penggunaan Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Ket
1	2	3	4	5
1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional	22.000.000,-	APBD	
2	Penyediaan layanan kebersihan kantor	33.000.000,-	APBD	
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,-	APBD	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000,-	APBD	
5	Penyediaan bahan logistik kantor	4.522.500,-	APBD	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23.750.000,-	APBD	
7	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	90.000.000,-	APBD	

8	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	25.000.000,-	APBD
9	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	519.967.600,-	APBD
10	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	150.119.900,-	APBD
11	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	65.350.000,-	APBD
12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	163.789.400,-	APBD
13	Worshop Pendataan Pendidikan Gratis	112.711.250,-	APBD
14	Lomba Olimpiade Nasional Guru	38.076.000,-	APBD
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.500.000,-	APBDP
16	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,-	APBDP
17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	566.651.858,-	APBDP
18	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	642.456.972,-	APBDP
19	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	288.779.225,-	APBDP
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	105.940.879,-	APBDP
21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.864.849,-	APBDP
22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	281.220.000,-	APBDP
23	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	24.100.000,-	APBD
24	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Sekolah (DAK)	1.566.000.000,-	APBDP
25	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Pendidikan Menengah/Kejuruan	15.000.000,-	APBDP
26	Penyusunan Profil Pendidikan	173.600.000,-	APBD
Jumlah		5.305.400.433,-	

Sumber data : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Th 2015

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran swakelola yang di alokasikan untuk swakelolah adalah lima milyar tiga ratus lima ribu empat ratus ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah. Dana swakelolah tersebut mengacu pada Pasal 1 angka yang mengatur bahwa Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003,bahwa dana swakelolah di danai oleh pemerintah dari APBN/APBD.Penggunaan dana swakelolah yang ada di Kabupaten Soppeng khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan semuanya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Teknis pelaksanaan dana swakelolah ini dilaksanakan dengan penunjukan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebuyaan berdasarkan pekerjaan yang direncanakan, dan diawasi sendiri oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rencana anggaran yang telah ditetapkan,

Selanjutnya penyediaan barang/jasa dapat diuraikan sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2 Penggunaan Anggaran Penyediaan Barangdari APBD Untuk Dinas Pendidikan

Dankebudayaan Kabupaten Soppeng Tahun 2011

No	Paket	Penggunaan Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Ket
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Lilirilau	450.000.000,-	APBD	
2	Biaya Perencanaan dan Pengawasan Gedung Kantor UPTD Lilirilau	25.000.000,-	APBD	
3	Pembangunan Pagar Kantor Dinas Dikmudora	200.000.000,-	APBD	
4	Pengadaan Motor (Bagian Perencanaan)	35.000.000,-	APBD	
5	Pengadaan Filling Cabinet, AC, Vacum Cleaner dan Kanopi	96.128.000,-	APBD	
6	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	3.300.000,-	APBD	
7	Pengadaan Komputer PC	7.600.000,-	APBD	
8	Pengadaan Notebook	11.000.000,-	APBD	
9	Pengadaan Printer	15.800.000,-	APBD	
10	Pengadaan Website Dikmudora dan Aplikasi Bendahara	40.000.000,-	APBD	
11	Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer	80.000.000,-	APBD	
12	Pengadaan LCD Proyektor	150.000.000,-	APBD	
13	Pengadaan Meja Kerja	12.000.000,-	APBD	
14	Pengadaan Kursi Kerja	16.200.000,-	APBD	
15	Pengadaan Tempat Tidur	8.500.000,-	APBD	
16	Pengadaan Sofa	39.000.000,-	APBD	
17	Pengadaan Lemari	4.000.000,-	APBD	
18	Pengadaan Kursi Tamu	16.500.000,-	APBD	
19	Pengadaan Karpet	10.400.000,-	APBD	
20	Penambahan Ruang Kelas SDN 140 Massumpu	135.842.000,-	APBD	
21	Pembangunan Pagar	1.035.000.000,-	APBD	
22	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 48 Latappareng	137.160.000,-	APBD	
23	Biaya Perencanaan dan Biaya Pengawasan Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 48 Latappereng	6.858.000,-	APBD	
24	Rehab Rumah Dinas SDN 175 JennaE	150.000.000,-	APBD	
25	Rehab Ruang Kelas SMPN 4 Marioriwawo	236.566.000,-	APBD	
26	Rehab Ruang Kelas SMPN 1 Marioriwawa	179.110.000,-	APBD	
27	Biaya Perencanaan dan Biaya Pengawasan	15.125.425,-	APBD	
28	Rehab Ruang Kelas SDN 151 Bunne	146.687.000,-	APBD	
29	Rehab Ruang Kelas SDN 141 Cennae	177.240.000,-	APBD	

30	Rehab Ruang Kelas SMPN 5 Lilirilau	150.000.000,-	APBD
31	Rehab Ruang Kelas SDN 57 Kaca	230.412.000,-	APBD
32	Rehab Ruang Kelas SDN 235 Goarie	220.268.000,-	APBD
33	Biaya Pengawasan dan Biaya Perencanaan	22.534.000,-	APBD
34	Rehab Ruang Kelas SMPN 1 Liliriaja	145.579.000,-	APBD
35	Rehab Ruang Kelas SMPN 1 Donri-Donri	156.929.756,-	APBD
36	Penambahan Ruang Kelas Baru SMPN 3 Marioriawa	363.948.000,-	APBD
37	Penambahan Ruang Kelas Baru SMPN 3 Lalabata	363.948.000,-	APBD
38	Biaya Perencanaan dan Biaya Pengawasan	32.719.800,-	APBD
39	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 148 Sanuale	271.684.000,-	APBD
40	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 70 Libukang	271.684.000,-	APBD
41	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 96 Citta	271.684.000,-	APBD
42	Penambahan Ruang Kelas SDN 15 Jolle	271.684.000,-	APBD
43	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 4 Kalenrunge	163.010.000,-	APBD
44	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 81 Belo	135.842.000,-	APBD
45	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 82 Managae	135.842.000,-	APBD
46	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 76 Tengapadange	135.942.000,-	APBD
47	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 43 Watanleworeng	135.842.000,-	APBD
48	Biaya Perencanaan dan Biaya Pengawasan	75.312.300,-	APBD
49	Rehab Ruang Kelas SDN 75 Lebbae	389.928.000,-	APBD
50	Rehab Ruang Kelas SDLB Pakkanrebete	236.320.000,-	APBD
51	Rehab Ruang Kelas SDN 7 Salotungo	265.860.000,-	APBD
52	Rehab Ruang Kelas SDN 51 Tonronge	177.240.000,-	APBD
53	Rehab Ruang Kelas SDN 186 Taluma Kaca	141.792.000,-	APBD
54	Rehab Ruang Kelas SDN 254 Mappatongai	177.240.000,-	APBD
55	Biaya Perencanaan dan Biaya Pengawasan	129.495.011,-	APBD
56	Rehab Ruang Kelas SDN 106 Toawo	212.688.000,-	APBD
57	Rehab Ruang Kelas SMPN 5 Marioriawa	315.421.000,-	APBD
58	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Lilirilau	315.421.000,-	APBD
59	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Lilirilau	197.805.000,-	APBD
60	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Lalabata	218.367.000,-	APBD
61	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 Liliriaja	236.566.000,-	APBD
62	Pembangunan Ruang Pertemuan UPTD Lalabata	200.000.000,-	APBD

63	Pemasangan Paving Blok UPTD Liliraja	120.000.000,-	APBD
64	Pemasangan Paving Blok Kantor Dinas Dikmudora	100.000.000,-	APBD
65	Biaya Perencanaan dan Pengawasan	84.100.000,-	APBD
66	Belanja Aset Non Tetap (Pengadaan Gorden)	17.500.000,-	APBD
67	Pengadaan Bel Timer	7.000.000,-	APBD
68	Pengadaan AC 2 PK untuk (server) Perencanaan	12.000.000,-	APBD
69	Pengadaan Televisi	26.500.000,-	APBD
70	Pengadaan Sekat Ruangan	54.000.000,-	APBD
71	Pengadaan Mic Set	6.000.000,-	APBD
72	Pengadaan Sumur Bor	16.000.000,-	APBD
73	Pengadaan All in One Core i3	52.500.000,-	APBD
74	Pengadaan Komputer All in One Core i5	16.000.000,-	APBD
75	Pengadaan Laptop Core i5	36.200.000,-	APBD
76	Pengadaan Laptop	19.200.000,-	APBD
77	Pengadaan Printer Infus 6 Tabung	4.450.000,-	APBD
78	Pengadaan Printer Inkjet Infus 4 Tabung	7.800.000,-	APBD
79	Pengadaan Printer Infus 4 Tabung	5.000.000,-	APBD
80	Aplikasi Manajemen Aset (AMS)	40.000.000,-	APBD
81	Aplikasi Pelaporan	40.000.000,-	APBD
82	Pengadaan Tower (5 UPTD)	72.500.000,-	APBD
83	Pengadaan Peralatan Jaringan (5 UPTD)	60.000.000,-	APBD
84	Pengadaan Meja Kerja Eselon III	33.000.000,-	APBD
85	Pengadaan Meja Rapat	20.000.000,-	APBD
86	Pengadaan Kursi Rapat Pimpinan	42.000.000,-	APBD
87	Pengadaan Kursi Rapat Aula	170.000.000,-	APBD
88	Pengadaan Lemari Arsip	8.000.000,-	APBD
89	Biaya Perencanaan dan Biaya Pengawasan	68.800.000,-	APBD
90	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 77 Ganra	150.000.000,-	APBD
91	Pembangunan Pagar SDN 28 Malaka	150.000.000,-	APBD
92	Pembangunan Pagar SMPN 3 Marioriwawo	200.000.000,-	APBD
93	Pembangunan Pagar SMPN 2 Marioriwawa	200.000.000,-	APBD
94	Pembangunan Pagar SMPN 4 Lilirilau	200.000.000,-	APBD
95	Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	90.000.000,-	APBD

96	Pengadaan Meja Siswa	30.000.000,-	APBD
97	Pengadaan Kursi Siswa	10.000.000,-	APBD
98	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 129 AbbanuangE	140.000.000,-	APBD
99	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 269 AllakiangE	180.000.000,-	APBD
100	Rehab. Ruang Kelas Sekolah SMPN 2 Marioriwawo (Pendamping DAK)	200.171.000,-	APBD
101	Rehabilitasi Ruang Guru Sekolah SDN 20 Totakka	200.000.000,-	APBD
102	Rehabilitasi Laboratorium SMPN 2 Donri-Donri	140.000.000,-	APBD
103	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah Dasar (7 Sekolah)	420.000.000,-	APBD
104	Pembangunan WC SMPN 1 Marioriawa	77.351.000,-	APBD
105	Pengadaan Konstruksi Pagar/Gerbang SMAN 1 Donri-Donri	199.500.00,-	APBD
106	Rehasb. RKB. SMAN 3 Watansoppeng (2 Ruang)	101.837.455,-	APBD
Jumlah		19.341.834.180,-	

Sumber data : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat ditotalkan penggunaan anggaran penyediaan barang sebesar sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah.

Penggunaan APBD tersebut di atas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dimana terserap untuk dana anggaran penyediaan barang yang dilakukan dalam bentuk fisik dengan teknik penggunaan anggaran melalui tender proyek untuk tahun anggaran 2015.

B. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Pengguna Barang dan Jasa Bilamana Terjadi Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk dapat menentukan **alternatif penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak** yang akan kita pilih, maka sangat diperlukan pemahaman mengenai pengertian dari masing-masing lembaga tersebut yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a) Musyawarah

Musyawarah merupakan salah satu asas dasar negara Indonesia yang membedakannya dengan negara-negara lain. Musyawarah tercantum di dalam sila ke empat dari Pancasila. Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya merupakan kesepakatan atau kata sepakat antara pihak-pihak yang berbeda pendapat sehingga pemungutan suara dapat dihindarkan semua pihak yang berbeda pendapat dapat menemukan keputusan tunggal.

Musyawarah sering ditampilkan sebagai alternatif dari pengambilan suara. Penggunaan sistem pemungutan suara di takutkan oleh bapak-bapak bangsa akan menimbulkan penindasan oleh mayoritas baik oleh suku, agama, kepercayaan, bahasa, dan lain-lain. Dan menimbulkan perselisihan negara dan tidak sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika.

b) Mediasi.

Ada 2 jenis mediasi, yaitu didalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi diluar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada didalam pengadilan diatur oleh peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari Hakim-Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator Hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

c) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan para pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan diluar pengadilan. Konsiliasi tidak berbeda dengan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1851 BW.

d) Arbitrase

Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

e) Pengadilan

Dalam ketentuan pelaksanaan hukum acara perdata Indonesia dikenal 3 (tiga) tingkat pengadilan dalam mengadili perkara perdata, pemeriksaan dan pemutusan perkara pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan pada tingkat Mahkamah Agung.

Kehadiran 3 (tiga) tingkat pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara perdata ini dihubungkan dengan hak untuk mengajukan upaya hukum yang dimiliki masing-masing pihak berperkara bila salah satu dari pihak yang berperkara tidak setuju atau tidak puas dengan putusan pengadilan. Artinya, ketika salah satu pihak yang berperkara tidak dapat menerima putusan dari Pengadilan Negeri yang memutuskan perkaranya maka pada ketentuan waktu yang diperbolehkan, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Arti banding yaitu merupakan pemeriksaan dalam instansi (tingkat) kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan, baik yang mengenai fakta-faktanya, maupun penerapan hukum atau undang-undang.

Begitu pula selanjutnya, ketika masing-masing pihak yang berperkara tidak dapat menerima putusan dari Pengadilan Tinggi, mereka dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Pemeriksaan kasasi untuk perkara perdata diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang No.14 Tahun 1985. Sedangkan pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana menggunakan hukum acara sebagaimana diatur oleh KUHAP (Pasal 54 Undang-undang No.14 tahun 1985).

Menurut **Drs. Umar, M.Si** sebagai Kabid Prasarana Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng bahwa dalam penyelesaian keterlambatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang paling efektif adalah melalui musyawarah antara pihak kontraktual dengan pemerintah. Apabila proses musyawarah tidak tercapai barulah ditempuh secara mediasi dan konsensual. Kalau hal tersebut gagal maka ditempuh melalui pengadilan (Wawancara Selasa, 8 Maret 2011).

Memang harus diakui bahwa jalan yang terakhir adalah dalam penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa melalui pengadilan hal ini dilakukan kalau terpaksa, keadaan yang demikian menimbulkan kesan yang kurang baik antara pihak kontraktual dengan pihak pemerintah.

Dalam masalah keterlambatan penanganan barang dan jasa dapat diberikan berupa teguran, denda, pemberhentian pekerjaan dan pemutusan kontrak kerja bagi kontraktual. Pemberian sanksi bagi kontraktual apabila mengalami keterlambatan pengadaan barang dan jasa yang dianggap paling ringan berupa teguran.

KESIMPULAN

1. Kontrak yang dilakukan berupa pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara swakelola berupa penunjukan kepada pihak kontraktual oleh pihak pemerintah daerah. Juga dilaksanakan secara penyediaan barang dengan cara melalui tender kepada para pihak kontraktual. Anggaran yang dipakai untuk swakelola lebih dibawa ketimbang anggaran penyediaan barang. Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah sesuai dengan prinsip regulasi yang berlaku yaitu efektif, efisien, terbuka, transparan, berlaku adil dan akuntabel.
2. Upaya yang dilakukan oleh pengguna Barang dan Jasa bilamana terjadi Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara swakelola dan penyediaan barang dan apabila terjadi masalah diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, konsultasi, lewat pengadilan. Penyelesaian suatu kontrak pengadaan barang/jasa selesai pekerjaan, diluar kekuasaan kedua belah pihak, pembatalan kontrak dan pemutusan kontrak, hal ini sesuai kontrak yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng

SARAN

1. Kontrak pengadaan barang dan jasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang mewakili badan hukum publik dengan penyedia barang dan jasa seharusnya dibuat dihadapan Notaris agar dapat memberikan pembuktian yang kuat bagi wewenang para pihak dalam kedudukannya, dalam hal ini termasuk akan memberikan pembuktian yang kuat dan sempurna bagi keabsahan identitas dan keabsahan wewenang pejabat penandatanganan kontrak yang mewakili badan hukum publik tersebut dihadapan pihak ketiga atau aparat pengawas sehingga dapat meningkatkan transparansi, integritas dan keadilan serta perlindungan yang objektif bagi semua pihak guna kepentingan suatu pembuktian apabila terjadi suatu wanprestasi.

2. Jika salah satu pihak melihat gejala wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan sebaiknya memberikan somasi terlebih dahulu agar tidak sampai terjadi suatu kerugian sebagai akibat dari wanprestasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Deepublish.
- Badjuri, A., & Trihapsari, E. (2004). Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah. *Fokus Ekonomi*, 3(2), 1-10.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Hidayat, C. N. (2020). Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik. *Pamulang Law Review*, 2(1), 37-46.
- Kunarti, S. (2009). Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 67-75.
- Laya, A. (2009). Aspek Hukum Perjanjian Kerja Dalam Proyek Bangunan. *Jurnal Legalitas*, 2(3), 12556.
- Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 113-133.
- Pane, M. D. (2018). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Media Hukum*, 24(2), 147-155.